

LOKAKARYA

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT LPM IPB
DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KERJASAMA
BOGOR, 13-14 JANUARI 1993

LOK-PPM.VB

PROGRAM PEMDA DAN SEKTORAL
YANG DAPAT DILAKSANAKAN BERSAMA DENGAN IPB

Oleh :

BAPPEDA KABUPATEN DT II BOGOR



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1993

PROGRAM PEMDA DAN SEKTORAL YANG DAPAT DILAKSANAKAN BERSAMA DENGAN IPB¹⁾

Oleh :

Ir. Duddy Suyudi²⁾

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan kondisi geografis, geologis dan kondisi perkembangan Kabupaten Bogor, maka Kabupaten Bogor memiliki keunggulan komparatif. Antara lain adalah kondisi sumberdaya air yang relatif banyak tersedia, kondisi tanah yang relatif subur dan kondisi geografis yang strategis karena mendekati pusat pemerintahan dan pasar yaitu DKI Jakarta serta kemudahan memperoleh informasi/teknologi dari lembaga-lembaga penelitian dan lembaga perguruan tinggi seperti UI, IPB, dan sebagainya.

Selain keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bogor, juga terdapat kendala-kendala yang muncul sebagai akibat perkembangan/pembangunan Kabupaten Bogor yang pesat. Seperti berkurangnya lahan-lahan pertanian, menurunnya kualitas air dan udara, bertambahnya areal pemukiman kumuh, tingginya tingkat migrasi, tingkat kesakitan dan kematian yang relatif masih tinggi dan sebagainya.

Guna memperoleh program-program yang rasional, tentunya diperlukan suatu penelitian dalam pembuatan suatu perencanaan yang baik. Lembaga perguruan tinggi merupakan alternatif yang tepat dalam upaya mengembangkan penelitian yang aplikatif dan pembinaan unsur teknis dan manajerial sesuai dengan disiplin ilmu di perguruan tinggi yang bersangkutan.

-
- 1) Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengabdian Pada Masyarakat LPM IPB dan Penyusunan Program Kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kerjasama, di LPM IPB Bogor tanggal 13 - 14 Januari 1993.
 - 2) Ketua Bappeda Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor

Langkah kerjasama yang dapat ditempuh dengan perguruan tinggi adalah melalui kerjasama dalam penyusunan atau pembuatan suatu program ataupun suatu kaji tindak (action research) di lapangan, penerapan teknologi tepat guna serta kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil - hasil kerjasama yang telah dilaksanakan antara IPB dan Kabupaten Bogor, juga bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan di tahun-tahun mendatang, setelah mengetahui gambaran permasalahan yang dihadapi dan kebijaksanaan yang dicarikan Pemda Kabupaten Bogor.

Diharapkan lokakarya ini dapat merumuskan program bersama antara Institut Pertanian Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

II. KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

2.1. Pelaksanaan Kerjasama dengan IPB

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Institut Pertanian Bogor, selama ini telah berjalan baik dan cukup progresif.

Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan adalah dalam rangka pelaksanaan perencanaan maupun pembangunan daerah dan sektoral. Jenis-jenis kerjasama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan sektoral terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Kerjasama rutin antara IPB dan Pemda Kabupaten DT II Bogor adalah dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

(KKN), untuk menunjang pelaksanaan intra kurikuler IPB dan membantu pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor di Pedesaan. Sampai saat ini pelaksanaan KKN berjalan cukup baik dan disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

Kerjasama yang bersifat insidental yang telah dilaksanakan adalah berupa kerjasama dalam penyusunan Pola Dasar dan Pelita V, penyusunan rencana pengembangan Gunung Salak Endah (GSE), pembuatan demplot pertanian terpadu di Desa Tapos Kecamatan Parungpanjang, pelaksanaan demplot pembenihan ikan, program lingkaran kampus di Dramaga dan kegiatan kaji tindak yang sedang berlangsung adalah penelitian Situ Cikaret di Kecamatan Cibinong.

Kerjasama yang sedang dirintis dan akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan Ibukota Kabupaten Bogor di Cibinong adalah pengisian ruang terbuka hijau baik dalam rangka penghijauan kota maupun pengaturan lansekap kota. Diharapkan dengan adanya rintisan kerjasama ini dapat menghasilkan kinerja Kota Cibinong yang khusus sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Bogor.

2.2. Hambatan/Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kerjasama antara IPB dengan Pemda Kabupaten Dati II Bogor tidak luput dari hambatan/kendala. Hambatan atau kendala yang dihadapi diantaranya adalah :

- Lebih banyak diakibatkan karena adanya kesenjangan informasi dan komunikasi antara kedua lembaga. Akibat kesenjangan informasi dan komunikasi, maka banyak hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan IPB belum dapat diimplementasikan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Begitu pula sebaliknya banyak permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bogor yang memerlukan penelitian khusus dan bimbingan secara teknis, belum dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

- Dana pembangunan pada umumnya telah dialokasikan untuk program-program rutin atau yang berkelanjutan, sehingga program-program kerjasama yang bersifat insidental mendapatkan porsi yang terbatas.

III. PROSPEK KERJASAMA DI MASA YANG AKAN DATANG

Kerjasama antara IPB dan Pemda Kabupaten Bogor di masa yang akan datang, akan lebih optimal bila diawali dengan mengamati permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya melalui program-program yang disusun secara bersama-sama. Selain itu perlu pula diperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau program baik dari IPB maupun dari Pemda Kabupaten Bogor.

Untuk meningkatkan kerjasama antara Pemda Kabupaten Bogor dan IPB, maka sangat diperlukan keterlibatan kedua lembaga dalam perencanaan suatu program. IPB sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai gagasan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bogor, perlu mengetahui secara rinci mekanisme perencanaan yang berlaku di Kabupaten Bogor, berikut tahapan dan waktu/jadwal pelaksanaan perencanaan pada setiap pentahapannya. Dengan demikian program kerjasama ini dapat diantisipasi secara dini baik mengenai program/kegiatan ataupun pendanaannya.

Dari kebijaksanaan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dapat menjadi peluang kerjasama antara IPB dan Kabupaten Bogor dimasa mendatang. Penyusunan program selanjutnya yang merupakan penjabaran dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, perlu dikaji dan direncanakan secara koordinatif antara kedua lembaga yang bersangkutan. Peningkatan frekuensi atau komunikasi antara

IPB dan Kabupaten Bogor dimasa mendatang, sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi terutama mengenai bentuk kebijaksanaan dan mekanisme perencanaan di kedua lembaga, sehingga dapat menghasilkan program-program yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bogor dan langkah kebijaksanaan yang akan diupayakan, serta mekanisme perencanaan program di Kabupaten Bogor, diuraikan dalam sub bab berikut:

3.1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bogor

Letak Kabupaten Bogor di antara dua kutub pengembangan, yaitu DKI Jakarta dan Kotamadya Bogor, memberikan pengaruh yang besar terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor. Terbatasnya areal terbuka di Kotamadya Bogor dan DKI Jakarta, memerlukan penyediaan lahan di wilayah Kabupaten Bogor untuk keperluan pemukiman. Wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor yang padat dengan pemukiman, tampak terlihat di wilayah-wilayah perbatasan dengan Kotamadya Bogor, seperti Kecamatan Ciomas, Kedunghalang dan perbatasan dengan DKI Jakarta seperti Kotip Depok, Kecamatan Cibinong, Cimanggis, Bojonggede dan Parung. Selain wilayah pemukiman seperti yang telah diuraikan di atas, di Kecamatan lain seperti; Gunung Putri, Citeureup dan Cimanggis diwarnai oleh kegiatan-kegiatan industri, yang juga menimbulkan arus migrasi yang cepat.

Tingginya tingkat migrasi dan cepatnya pembangunan di Kabupaten Bogor menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam.

Permasalahan-permasalahan sosial yaitu tingginya rata-rata laju pertumbuhan penduduk terutama karena migrasi (2.2 %), tingkat kesakitan dan kematian bayi yang relatif masih tinggi, tingkat sanitasi lingkungan yang kurang memenuhi

syarat terutama pada areal pemukiman kumuh (slum area) serta tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat yang masih relatif rendah.

Permasalahan ekonomi lebih kepada tingkat pendapatan dan penghasilan masyarakat yang relatif masih rendah, berkurangnya lahan-lahan pertanian serta ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan kerja dengan pencari kerja.

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan meliputi permasalahan kualitas dan kuantitas air, kualitas udara terutama di lingkungan industri, perlunya penataan kota dan lingkungan kumuh, permasalahan tingkat transportasi regional sebagai implikasi tingkat commuter yang tinggi terutama di wilayah perbatasan dengan Kotamadya Bogor dan DKI Jakarta, permasalahan terjadinya degradasi kondisi perairan dan lingkungan situ serta banyaknya lahan-lahan bekas galian C yang perlu direklamasi.

3.2. Kebijakanaksanaan

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Bogor, maka didalam perencanaan suatu wilayah mengacu pada pendekatan teknis planologis dan administrasi pemerintahan. Dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, dikemukakan bahwa sistem pembangunan dilaksanakan melalui kebijakanaksanaan Spatial (tataruang) dan kebijakanaksanaan sektoral. Untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II, penekanan kebijakanaksanaan diarahkan pada :

1. *Penurunan Angka Kesakitan dan Kematian* melalui:

- a. Peningkatan peran dan pengembangan Posyandu dan Puskesmas.
- b. Pemasayaran Pondok Persalinan Desa.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kesehatan.

- d. Peningkatan dan pemasyarakatan UKS, Gizi Keluarga dan KB terutama di daerah pedesaan.
 - e. Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan penyempurnaan administrasi kependudukan dan intensitas Keluarga Berencana.
 - f. Penataan dan penanganan pemukiman dan kesehatan lingkungan daerah kumuh.
2. *Peningkatan Pengendalian dan Penertiban Penggunaan Lahan.*
- a. Penertiban asset pemerintah melalui gerakan pensertifikatan tanah-tanah yang dikuasai/digarap masyarakat.
 - b. Peningkatan penegakkan hukum dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan tanah.
 - c. Peningkatan kelestarian sumberdaya alam antara lain melalui Prokasih, Reboisasi, UPSA dan pengendalian pengambilan air tanah serta pemeliharaan situ-situ agar sesuai dengan fungsinya.
3. *Peningkatan Produktivitas Lahan*
- a. Perbaikan bendung dan saluran air.
 - b. Pemanfaatan lahan pekarangan.
 - c. Meningkatkan sarana/prasarana balai benih.
 - d. Meningkatkan peranan dan fungsi P3A Mitra Cai.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh pertanian.
 - f. Meningkatkan kemampuan peran dan pengurus KUD dalam bidang manajemen dan pemasaran.
 - g. Peningkatan intensitas pembinaan terhadap pengrajin & kelompok-kelompok tani yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 - h. Peningkatan kemudahan permodalan terutama bagi pengrajin dan pedagang kecil.
4. *Peningkatan Prasarana Jalan Kolektor*
- Dalam rangka pengembangan perekonomian di daerah, khususnya di pedesaan, maka kegiatan pengembangan prasarana

perhubungan perlu lebih ditingkatkan, juga dalam rangka mengantisipasi kota-kota kecamatan yang semakin berkembang, maka diperlukan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pengembangan prasarana perhubungan yang menuju daerah produksi pertanian/kerajinan dan pariwisata.
- b. Pengembangan jalan kolektor, khususnya di kota-kota Kecamatan dan jalan lokal serta penyempurnaan prasarana perhubungan di daerah industri.
- c. Menumbuhkan peran swasta dalam mengembangkan/menggali potensi obyek wisata dan memberikan kemudahan dalam proses perijinannya.

5. *Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja melalui Pendidikan formal dan non formal*, melalui:

- a. Peningkatan intensitas latihan tenaga kerja yang dikaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja.
- b. Peningkatan ketrampilan melalui LKK.
- c. Pengembangan sentra industri kecil, perajin dan kelompok tani serta usaha ekonomi desa.
- d. Mendorong para pengusaha untuk dapat membuka balai latihan kerja.
- e. Meningkatkan peran lembaga tripartit.
- f. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan perajin baik teknik/mutu maupun manajemen pemasaran.
- g. Melanjutkan program keterkaitan, pembinaan Bapak angkat dan mitra kerjanya.

6. *Pengembangan dan Pendayagunaan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Pertanian dan Industri Kecil*. Dengan adanya kegiatan penelitian yang dilaksanakan baik oleh perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang ada di Kabupaten Bogor, dimasa yang akan datang kegiatan penelitian tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Langkah-langkah yang perlu diupayakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang ada, dengan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian dan industri kecil.
7. *Melanjutkan Penanganan Daerah Minus dan Kritis*, melalui:
- a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan dari dinas/ instansi terkait yang memiliki program dengan mengalokasikannya ke daerah tersebut melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) dan Pengembangan Desa Terpadu (PDT).
 - b. Mewaspadaikan daerah-daerah yang diduga akan terjadi rawan pangan dan daerah yang sering terjadi bencana (longsor, banjir dan kebakaran).
 - c. Menumbuhkembangkan kegiatan usaha ekonomi desa yang sudah ada, baik kelompok tani, kerajinan dan usaha ekonomi lainnya.

3.3. Mekanisme Perencanaan Program dan Pelaksanaannya

Sesuai dengan Pelaksanaan Inmendagri No. 4 Tahun 1981 tentang Program/Proyek Masuk Desa dan Permendagri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D), setiap tahun terdapat 3 jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dan Para Penanggung Jawab Perencanaan Pembangunan di Daerah, yaitu:

1. Menyusun rencana program/proyek untuk tahun yang akan datang.
2. Melaksanakan program/proyek yang sedang berjalan yang termasuk dalam bidang tugasnya dan mengendalikan program/proyek yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang bersangkutan.
3. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/proyek tahun sebelumnya.

Ketiga jenis kegiatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sama.

Perumusan Usulan Program/Proyek Secara Terpadu.

- a. Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistim perencanaan dari bawah (Bottom Up Planning) dalam menyusun/mengajukan rencana usulan prgoram/proyek pembangunan di Daerah baik yang dibiayai oleh APBN/APBD I/APBD II maupun swadaya masyarakat.
- b. Disamping menampung aspirasi masyarakat, penjabaran Kebijakan Nasional di daerah, disalurkan pula melalui mekanisme perencanaan dari atas (Top Down Planning) lewat jalur kelembagaan yang sudah ada, dengan kata lain perpaduan antara Bottom Up dan Top Down Planning sedapat mungkin dikembangkan dalam setiap phase perencanaan pembangunan di daerah.
- c. Petunjuk dan prosedur penyusunan serta pengesahan program/proyek.

Mengingat program/proyek yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan, maka dalam proses penyusunan dan pengusulannya masalah koordinasi dan keterpaduan mendapat perhatian utama dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. *Musyawarah Pembangunan (Musbang) Tingkat Desa/Kelurahan*
Setiap tahun sedini mungkin LKMD yang dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dengan bimbingan Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan melalui Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan antara lain inventarisasi potensi desa, saran-saran pemecahan masalah dan selanjutnya menyusun usulan rencana program/proyek pembangunan baik yang dibiayai dengan swadaya Pembangunan Desa, APBD II dan APBD I serta APBN untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Camat guna dibahas dalam Temu Karya pembangunan tingkat Kecamatan.

Waktu penyelenggaraan musyawarah dilaksanakan sekitar bulan Maret/April.

2. *Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan*

- a. Temu karya pembangunan pada tingkat kecamatan ini dilakukan baik dalam bentuk diskusi UDKP maupun dalam bentuk temu karya LKMD yang dipimpin oleh Camat dengan bimbingan Ketua Bappeda Tingkat II dan dibantu oleh Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Tingkat II Bogor dengan tujuan membahas kembali rencana program/proyek pada tingkat kecamatan.
- b. Peserta Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan baik dalam bentuk Temu Karya LKMD maupun diskusi UDKP adalah semua LKMD sewilayah Kecamatan dan aparat Dinas Instansi vertikal di tingkat Kecamatan.
- c. Waktu penyelenggaraan Temu Karya dilaksanakan pada bulan April/Mei. Temu Karya LKMD Tingkat Kecamatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:
 1. Usulan Rencana Program/Proyek yang akan dibiayai baik oleh swadaya masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan, maupun oleh bantuan pembangunan desa, dikembalikan pada desa yang bersangkutan.
 2. Usulan Rencana Program/Proyek yang sudah diseleksi akan dibiayai oleh APBD I, APBD II, Bantuan INPRES, dan APBN, diteruskan kepada Bupati Daerah Tingkat II Bogor untuk selanjutnya dibahas dalam forum Rakorbang Tingkat II Kabupaten Bogor.
 3. Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) Daerah Tingkat II.
 - a. Untuk melengkapi bahan penyusunan program/proyek pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya, selain menggunakan paket usulan rencana program/proyek pembangunan hasil rumusan Temu

Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan, maka Bupati meminta kepada Dinas/Satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Instansi/Lembaga Vertikal dalam lingkungan daerah tingkat II untuk mengajukan usulan Rencana Program/Proyek pembangunan tahunan masing-masing.

- b. Dibawah koordinasi Ketua Bappeda Tingkat II, usulan rencana program/proyek hasil Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan dan usulan rencana program/proyek yang dimaksud dalam butir a, secara intern dibahas dan diolah lebih dahulu oleh Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan Setwilda Tk. II serta Kepala Kantor Pembangunan Desa.
- c. Dengan petunjuk, bimbingan dan pengarahan Bupati, baik mengenai strategi maupun prioritas pembangunan sesuai dengan PELITA Nasional dan usulan rencana program/proyek pembangunan yang dimaksud dalam butir b di atas dibahas lagi dalam suatu Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat II yang dihadiri oleh para Kepala Wilayah Kecamatan, Dinas/Instansi/Lembaga Vertikal dan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan dan keserasian program/proyek pembangunan tingkat kabupaten.
- d. Waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II dicanangkan sekitar bulan Mei/Juni.
- e. Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat II diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan/usulan-usulan program/proyek pembangunan:

1. yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat II
2. yang akan dibiayai oleh APBD Tingkat I
3. yang akan dibiayai oleh APBN, diusulkan lewat Sektoral/Intansi Vertikal di Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan
4. yang akan dibiayai oleh program Bantuan Pembangunan (INPRES)
5. yang akan diusulkan sebagai proyek khusus (Banpres, Kerjasama Luar Negeri, dsb.)
6. yang akan dibiayai oleh perbankan.

Usulan program/proyek di atas oleh Bupati KDH Tingkat II dimuat dalam format-format yang ditentukan, selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur KDH Tingkat I u.p. Ketua Bappeda Tingkat I dan Ketua Bappenas u.p. Deputy Bidang Regional & Daerah serta Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Pembangunan Daerah.

IV. PENUTUP

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor dengan Institut Pertanian Bogor, merupakan langkah tepat dalam upaya merumuskan program-program rasional yang langsung dapat mengenai sasaran program.

Kegiatan kerjasama yang bersifat rutin seperti halnya KKN (Kuliah Kerja Nyata), perlu terus dilanjutkan, mengingat hasil nyata yang dapat diberikan pada mahasiswa sebagai motivator dan inovator, terhadap pembangunan dan pembinaan masyarakat pedesaan.

Demikian pula kerjasama-kerjasama dalam sektor pertanian dalam arti luas, perlu ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor.